

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Lorena K. Sirega¹, H. V. R. Pattimukay², Jeanly Waisapy³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka Ambon, 97233

Email : lorenasiregar3300@gmail.com¹

Abstraksi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Hasil penelitiann menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berjalan cukup baik meskipun banyak hambatan yang ditemui. Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dimana empat diantaranya belum terlaksana secara optimal. Sehingga untuk saran yang diajukan yaitu Perlu diadakannya pengajuan data terbaru atau aparat pemerintah harus melakukan pembaharuan terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan serta berkonsultasi langsung dengan pendamping desa, Pemerintah selaku penyelenggara wajib memberikan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan data administrasi KPM.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Abstract

This research is a descriptive qualitative study that aims to analyze the Evaluation of the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Tawiri Village, Teluk Ambon District.

This research was conducted in Tawiri Village, Teluk Ambon Sub-district. Primary data were collected through interviews with a number of informants who were directly involved in the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Tawiri Village, Teluk Ambon Sub-district.

The results showed that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Tawiri Village, Teluk Ambon Sub-district went well despite the many obstacles encountered. This can be seen from 6 (six) policy evaluation criteria namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy where four of them have not been implemented optimally. So for the suggestions submitted, namely the need to submit the latest data or government officials must make updates related to Non-Cash Food Assistance for underprivileged people who do not get assistance and consult directly with village assistants, the Government as the organizer is obliged to provide socialization to Beneficiary Families about the Non-Cash Food Assistance Program, the Government also needs to improve administrative data on families who receive benefits.

Keywords: Evaluation, Program, and Non-Cash Food Assistance.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hal yang paling penting bagi suatu negara. Hal ini juga merupakan masalah yang kerap kali dihadapi oleh negara berkembang. Dalam hal ini kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara dalam pemenuhan kebutuhan material, spriritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Durham dalam Suud (2006:7) Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan menjadi empat bagian yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Isu-isu sosial
2. Tujuan-tujuan kebijakan
3. Perundangan/Peraturan
4. Program-program kesejahteraan sosial.

Sen (2008:8) mengemukakan kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (levels of living), pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs fulfillment), kualitas hidup (quality of life) dan pembangunan manusia (human development).

Namun pada kenyataannya, permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Masih banyak warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya mengalami disfungsi sosial, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia.

Sebagai suatu negara, Pemerintah Indonesia memiliki peran yang begitu penting dalam mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah sebagai pegawai negeri tentunya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Terdapat berbagai fungsi pemerintahan, salah satunya adalah fungsi sekunder, diantaranya adalah fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Dari fungsi tersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan, diantaranya tentunya terdapat berbagai kegiatan

untuk mencapai tujuan dari program tersebut dan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban sosial pemenuhan kebutuhan dasar yang benar dan salah Program Bantuan Pangan Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun Elektronik Warung (e-warung). Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan ke beberapa kabupaten/kota terpilih di Indonesia yang dinilai memiliki kesiapan dari segi akses dan fasilitas untuk melaksanakan program tersebut. Salah satu Kabupaten/Kota yang terpilih untuk menjadi sasaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini adalah Kota Ambon dengan jumlah 10.559 sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada periode Bulan April-Juni pada tahun 2022 yang terdiri dari beberapa desa/nagri.

Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, pada tanggal 12 juli 2017 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang menyatakan bahwa:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
4. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

5. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
6. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.
7. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.

Pada Senin 13 Maret 2022 Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan kebijakan pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako secara tunai. Dan juga menekankan kebijakan salur bantuan sosial dalam bentuk tunai sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagaimana yang tercantum pada Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Pada Pasal 5 (1) terkait mekanisme penyaluran dapat dilakukan dengan cara penarikan uang dan/atau pembelian barang.

Untuk mempercepat sisa penyaluran bansos tahun anggaran 2021, Kemensos juga menerbitkan petunjuk teknis (juknis). Tujuan penerbitan juknis tersebut untuk melakukan percepatan pencairan bantuan sosial (bansos) dan memberikan payung hukum bagi Program Sembako yang disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Dalam pelaksanaan bantuan di Kota Ambon khususnya di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon banyak yang harus dihadapi, seperti yang saya amati di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, yaitu:

1. Kurangnya tenaga pendamping yang profesional dalam melaksanakan pendampingan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Data Administrasi Kependudukan (NIK) yang tidak padan Capil.
 - Nik dan nomor KK salah ketik ketika login.
 - KPM masih menggunakan nomor KK lama.
 - KPM masih menggunakan NIK dengan status perkaman e-KTP duplicate record atau data ganda.
 - NIK dipakai orang lain mendaftar.
3. Data kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan yang terdapat di surat perintah pencairan Dana (SP2D).

KAJIAN PUSTAKA

Mengikuti William N. Dunn (2003: 608-610), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai dan peluang diwujudkan melalui tindakan publik. Evaluasi membantu menerapkan metode analisis kebijakan lainnya termasuk mengajukan pertanyaan dan membuat rekomendasi. Oleh karena itu, meskipun evaluasi kebijakan melibatkan keseluruhan proses kebijakan, namun lebih memperhatikan pada pengimplementasian kebijakan, khususnya implementasi kebijakan publik. Penilaian pemberlakuan dilakukan secara *ex post facto*, lebih pada proses pemberlakuan daripada isi kebijakan, biasanya hanya menilai apakah proses pemberlakuan telah mengikuti prosedur yang telah disepakati.

Dunn (1999) menyebutkan bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat kebijakan. Dalam evaluasi terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian meskipun secara prinsip, antara kedua kegiatan ini memiliki metode yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan pelaksanaannya. Jika penelitian bertujuan untuk membuktikan sesuatu (prove) maka evaluasi bertujuan untuk mengembangkan (improve). Terkadang, penelitian dan evaluasi juga digabung menjadi satu frase penelitian evaluasi. Sebagaimana disampaikan oleh Subarsono (2006) penelitian evaluasi mengandung makna pengumpulan informasi yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan objektif.

Evaluasi program bukanlah kegiatan untuk menetapkan baik dan buruknya suatu program tetapi meminimalisir dampak negative atau pun kekurangan suatu program untuk tujuan perbaikan dimasa mendatang (Sdjana,2006). Evaluasi program ini merupakan sebuah dasar yang di gunakan untuk menilai atau mengukur secara sistematis kelebihan maupun kelemahan suatu program yang digunakan untuk memutuskan apakah program layak dilanjutkan atau diperbaiki. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan dipedagang bahan pangan atau E-Warong yang bekerjasama dengan bank.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, Serta mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).

Prinsip utama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini Mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-Warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan), Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.

Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana, Sumber Data KPM Bansos Pangan adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kejadian-kejadian secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah. Instrumen penelitian pada penelitian kualitatif yaitu manusia (human instrument) yaitu melibatkan peneliti itu sendiri. Keterlibatan peneliti yaitu dengan

memperhatikan kemampuannya dalam hal bertanya, mengamati, memahami dan mengabstraksikan data yang diperoleh sebagai alat penting yang tidak dapat diganti. Menurut lofland dan lofland (1984) sumber data pertama dalam kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan literatur.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung aparat desa Negeri Tawiri dan masyarakat sumber data dalam penelitian ini yaitu 10 orang informan. 1 orang Kepala Seksi Jaminan Sosial, 1 orang Kepala Seksi Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan, 1 orang Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, 2 orang Staf Desa Pemerintah Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan 5 orang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini aspek konsep variabel yang akan diteliti yaitu mengenai Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 Periode bulan April, Mei dan Juni di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Adapun indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan dari model teori Dunn (Nugroho, 2008 : 473) diantaranya yaitu:

1. Efektivitas (effectiveness)
 - a. Pencapaian Target Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil observasi pencapaian target dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil observasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat di Negeri Tawiri, namun belum efektif secara menyeluruh karena dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan secara tunai melalui PT. POS

Indonesia tidak sesuai fungsi dan tujuan dari BPNT itu sendiri dan dalam penggunaan bantuan yang diberikan secara tunai tidak efektif.

2. Efisiensi (efficiency)

a. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri cukup berjalan dengan baik namun belum maksimal, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya belum tepat waktu dan juga ada beberapa kendala seperti masih ada masyarakat sebagai KPM yang tidak mendapatkan informasi dan ada beberapa kendala lainnya yang terjadi seperti data administrasi kependudukan (NIK) yang belum padan dukcapil dan juga ketidaksesuaian data kependudukan (NIK) dan Nama KPM dengan SP2D dan juga adanya satu KPM yang menggunakan dua NIK.

3. Kecukupan (adequacy)

a. Kepuasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program ini dinilai positif. Artinya mereka mengalami perubahan kehidupan setelah adanya program ini. Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan pemerintah secara signifikan dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

b. Tingkat Kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dengan adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan sudah dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat meningkatkan ketahanan pangan ditingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Negeri Tawiri.

4. Pemerataan (equity)

a. Jenis manfaat yang diperoleh

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai ini memberikan manfaat yang positif, khususnya pada masyarakat kurang mampu sebagai KPM. Selain itu juga ada dari sisi negatif dimana masyarakat yang menerima bantuan yang berada dalam kategori golongan

keluarga yang memiliki ekonomi menengah dan keluarga yang masih produktif menerima bantuan membuat masyarakat menjadi malas, ketergantungan dan tidak mencari lapangan pekerjaan. Dalam hal ini juga sangat diharapkan juga untuk adanya pendataan baru untuk penerima, dikarenakan masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

5. Responsivitas (responsiveness)

a. Memberikan hasil yang baik

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri mendapat respon baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah dan mendukung adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon karena dapat memuaskan kelompok sasaran dalam artian masyarakat kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan atau KPM dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Meskipun hal ini merupakan bentuk dari memanjakan masyarakat yang membuat masyarakat jadi malas, apalagi yang menerima bantuan ini masih terdapat keluarga-keluarga yang masih produktif dan masih bisa bekerja.

6. Ketetapan (appropriateness)

a. Ketepatan target atau sasaran

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon masih belum tepat sasaran karena terdapat masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya masyarakat yang ekonominya sudah bisa dikatakan mampu masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Upaya yang harus dilakukan aparat pemerintah harus ada pembaharuan data terbaru terkait bantuan pangan non tunai (BPNT).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dari hasil wawancara dan observasi dengan informan, maka dapat disimpulkan bahwa di setiap dimensi dalam pelaksanaan dan penyalurannya belum optimal. Dapat dilihat dari dimensi Efektifitas dalam indikator pencapaian target dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan

di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat di Negeri Tawiri, namun belum efektif secara menyeluruh karena dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan secara tunai melalui PT. POS Indonesia tidak sesuai fungsi dan tujuan dari BPNT itu sendiri dan dalam penggunaan bantuan yang diberikan secara tunai tidak efektif.

Selain itu dari Dimensi Efisiensi dilihat dari indikator ketepatan waktu pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri cukup berjalan dengan baik namun belum maksimal, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya belum tepat waktu dan juga ada beberapa kendala seperti masih ada masyarakat sebagai KPM yang tidak mendapatkan informasi dan ada beberapa kendala lainya yang terjadi seperti data administrasi kependudukan (NIK) yang belum padan dukcapil dan juga ketidaksesuaian data kependudukan (NIK) dan Nama KPM dengan SP2D dan juga adanya satu KPM yang menggunakan dua NIK.

Kemudian Dimensi Kecukupan dilihat dari indikator kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sudah terlaksana dengan baik, Artinya KPM mengalami perubahan kehidupan dan setelah adanya program yang dijalankan pemerintah secara signifikan dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat serta dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat meningkatkan ketahanan pangan ditingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Negeri Tawiri.

Dimensi Perataan dilihat dari indikator jenis manfaat yang diperoleh bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini memberikan manfaat yang positif, khususnya pada masyarakat kurang mampu sebagai KPM. Selain itu juga ada dari sisi negatif dimana masyarakat yang menerima bantuan yang berada dalam kategori golongan keluarga yang memiliki ekonomi menengah dan keluarga yang masih produktif menerima bantuan membuat masyarakat menjadi malas, ketergantungan dan tidak mencari lapangan pekerjaan.

Dimensi Responsivitas dilihat dari indikator respon masyarakat terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri mendapat respon baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah dan mendukung adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Dimensi Ketepatan dilihat dari indikator adanya ketepatan target atau sasaran pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon masih belum tepat sasaran karena terdapat masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya masyarakat yang ekonominya sudah bisa dikatakan mampu masih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. dan Jabar, C. S. A, 2009. Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta
- Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Arikunto dan Jabar (2009: 5), evaluasi program
- Helvine Gultom, dkk, (2020: 43) Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Isaac dan Michael (1984: 6) sebuah program harus diakhiri dengan evaluasi
- Mardikanto, T, 1993. Peyuluhan Pembangunan Pertanian, University Sebelas Maret Press, Surakarta
- Meilani, M. T., & Sihabudin, A. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.
- Mitha Tri Meilani, Aan Anwar Sihabudin, Arie budiawan, 2022. Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Jurnal ilmu sosial Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
- Mizan, 2016: 63 Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, AlMaqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)
- Nurcholis, H, 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta
- Riant Nugroho, 2006, Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang: Model-model perumusan, implementasi, dan evaluasi, jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Rusmini, 2009. "Applikasi dan Evaluasi Kebijakan: Analisis Kebijakan : Analisis Kebijakan Walikota Jambi." Makalah dipresentasikan pada kegiatan seminar 1 Annual Coference on Islamic Education Management (ACIEM) di kota Jambi September.

Siti Maryam, Evita Ayu Candra. 2022. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Kelompok Masyarakat Miskin di Era Pandemi Covid 19 di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP) Universitas Muara Bungo

Suud, M. (2006). 3 Orientasi kesejahteraan sosial.

Suci Laurentcia, Rahmadani Yusran, 2021. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Journal of Civic Education.

Tan, T. J. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam (Doctoral dissertation, Prodi Administrasi Negara).

Widoyoko, E. P. (2009: 238). Evaluasi program pembelajaran. Yogyakarta: pustaka pelajar

William N Dunn, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Ketiga, Gajah Mada University Press Yogyakarta.

YANA, D., Kustiawan, K., & Winarti, N. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Sumber Undang-undang

Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sumber lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan kebijakan pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako adalah secara tunai.

Ambon, 14/11 (Antaraneews Maluku) - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kota Ambon terkendala warga yang tidak memiliki kartu identitas yakni kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPNT Bisa Dicairkan Jadi Uang Tunai, Risma: Jangan Paksa Penerima Bantuan Ambil Sembako",